

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI UTAMA  
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) ATAS TERJADINYA  
TINDAK PIDANA KORPORASI**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
(M.H.)



Oleh :

**SHENNY SALIMDRA**

**NIM: 156010100111013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI UTAMA  
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) ATAS TERJADINYA  
TINDAK PIDANA KORPORASI**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
(M.H.)

Oleh :

SHENNY SALIMDRA

NIM : 156010100111013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

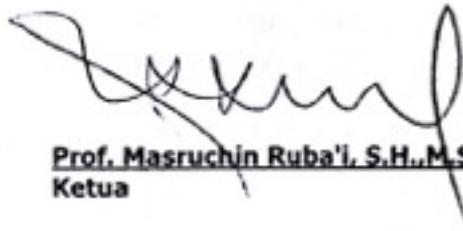
# TESIS

Judul :  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI UTAMA  
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) ATAS TERJADINYA  
TINDAK PIDANA KORPORASI**

Oleh :  
**Shenny Salindra  
NIM. 156010100111013**

telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 16 Agustus 2017  
dan dinyatakan memenuhi syarat

## Komisi Pembimbing



**Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.**  
Ketua



**Dr. Prija Diatmika, S.H., M.S.**  
Anggota

Malang,

Universitas Brawijaya  
Pascasarjana Ilmu Hukum  
Dekan



**Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.**  
NIP. 19620805 198802 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620823 198601 1 002

**IDENTITAS TIM PENGUJI :**

- 1. Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S. (Penguji I)**
- 2. Dr. Bambang Winarno , S.H.,M.S. (Penguji II)**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 16 Agustus 2017  
Mahasiswa



Nama : Shenny Salindra  
Nim : 156010100111013  
PS : Magister Ilmu Hukum  
FH UB

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shenny Salindra  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Juni 1993  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Wanita  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jalan Raya Nakula No. 37 RT. 23 Komp. BPP, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin  
Hp : 082358285003  
Email : [shennysalindra@gmail.com](mailto:shennysalindra@gmail.com)  
Status : Belum kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Riwayat Pendidikan :

1. SD Santa Maria Banjarmasin : Tahun 1996 - 2005
2. SMP Negeri 6 Banjarmasin : Tahun 2005 - 2008
3. SMA Negeri 7 Banjarmasin : Tahun 2008 - 2011
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat : Tahun 2011 - 2015

Malang, 16 Agustus 2017

Shenny Salindra

## Ringkasan

‘Bahwa selama ini pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya dibebankan terhadap pengurus korporasi secara formal atau berdasar pada anggaran dasar atau dokumen korporasi. Padahal dalam prakteknya ditemukan adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) korporasi yang merupakan pelaku utama atau orang yang secara faktual mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi dan mengambil manfaat atas tindak pidana korporasi yang dilakukannya. Disini yang menjadi persoalan bahwa pengendali utama (*beneficial ownership*) masih belum bisa dijangkau secara hukum sehingga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 59 KUHP pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada individu perorangan terkait tindak pidana korporasi oleh pengurus sedangkan undang-undang di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi masih tidak seragam dan tidak konsisten. Bahwa tindak pidana korporasi berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa dan negara, mengingat korporasi berperan penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu urgensi perumusan pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi perlu diatur dalam KUHP sebagai induk hukum pidana.

**Kata Kunci :** Pengendali Utama, *Beneficial Ownership*, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korporasi

## **Summary**

*Corporate criminal liability has been in general, levied formally against managers of corporations on the basis of articles of association, basic budgets, or other corporate documents. In practice however, the beneficial ownership of the corporation are the ones who actually direct or influence the corporate policy and receive benefit from the actions of the corporation and its resulting profits. The problem is that the beneficial ownership are still not legally accessible, and thus cannot be subjected to criminal liability. Under Article 59 of the Criminal Code, criminal liability is limited to individuals involved in corporate crime by the board. The laws outside the Criminal Code that govern corporate criminal liability are still non-uniform and inconsistent. Because corporations play an important role in the economy of the country, corporate crime has a profound impact on society, nation, and state. Therefore, it is urgent that in the matter of corporate crime, tcriminal liability of ultimate control (beneficial ownership) must be regulated in the Criminal Code as it is the main body of criminal law.*

### **Keywords:**

*Ultimate Control, Beneficial Ownership, Criminal Liability, Corporate Crime*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis dengan Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI UTAMA (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA KORPORASI” dapat diselesaikan dengan baik, guna memenuhi persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa di dalam Tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tesis ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, khususnya kedua orang tua penulis Drs. Buntoro Salindra dan Hj. Marzuqoh dan adik laki-laki penulis Syuna Salindra yang telah memberikan doa, ridho, dukungan dan motivasi sehingga Tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti.

Juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan serta bantuan moril maupun materiil. Perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Prof. Dr. MasruchinRuba'i, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Kedua yang telah begitu banyak meluangkan waktu, memberi petunjuk dan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya;

4. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S., dan Bapak Dr. Bambang Winarno , S.H.,M.S., selaku Penguji yang telah meneliti, memberi saran, dan masukan dalam penulisan tesis ini;
5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Kenotariatan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan staf PDIH yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
7. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, khususnya Magister Ilmu Hukum Kelas A yang baik langsung maupun tidak langsung turut memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis hanya bisa berdoa semoga segala kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang baik dimasa kini maupun di masa yang akan datang.

Malang, 11 Agustus 2017

Hormat Penulis,

Shenny Salindra, S.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>SUMMARY</i>.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.4.Manfaat Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.5.Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>1.6.Metode Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>1.7.Sistematika Penulisan.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1.Kajian Tentang Korporasi.....</b>	<b>34</b>
2.1.1. Pengertian Korporasi.....	34
2.1.2 Korporasi sebagai subjek hukum pidana.....	35
<b>2.2.Tindak Pidana Atau Perbuatan Pidana Korporasi.....</b>	<b>36</b>
<b>2.3. Pertanggungjawaban Pindana Korporasi.....</b>	<b>40</b>
2.3.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	40
2.3.2. Kemampuan Bertanggung Jawab Korporasi.....	43

2.3.3 Model dari Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	49
---	----

2.4.Pengertian dan Pengaturan Pengendali Utama ( <i>Beneficial Ownership</i> ).....	53
---	----

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1.Urgensi Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Utama ( <i>Beneficial Ownership</i> ) Atas Terjadinya Tindak Pidana Korporasi.....	56
---	----

3.2.Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Utama ( <i>Beneficial Ownership</i> ) Atas Terjadinya Tindak Pidana Korporasi Bagi Pembaharuan Kuhp Di Masa Yang Akan Datang.....	93
--	----

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1.Kesimpulan.....	120
4.2.Saran.....	121

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Tabel Orisinalitas.....	13
Tabel 2	: Desain Penelitian.....	26
Tabel 3	: Tabel penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana. (H. Setiyono (2013))....	98